

## Meneguhkan Eksistensi: Mengembangkan Organisasi Profesi Kepustakawanan di Indonesia<sup>1</sup>

Oleh  
Suherman<sup>2</sup>

### Pendahuluan

Usia tiga puluh enam tahun bukanlah usia yang muda lagi untuk ukuran sebuah organisasi seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), secara psikologis usia menjelang empat puluh tahun juga merupakan sebuah umur transisi apakah menuju kematangan berorganisasi atau sebaliknya menuju titik ketiadaan atau kehancuran. Ada sebuah kesan bahwa dalam menjalankan umur sejarahnya IPI seperti seorang pertapa yang bersahaya yang berjuang sendirian jauh dari ingar-bingar kehidupan sosial kemasyarakatan. Hampir tidak memiliki teman seperjuangan (*networking*). Tidak pernah menjadi buah bibir masyarakat. Tidak pernah jadi *headline* media massa, apalagi menjadi *trend setter* agenda-agenda nasional. Konsekuensinya adalah IPI tidak diperhitungkan dalam percaturan penentuan kebijakan nasional atau tidak pernah diajak urun-rembuk dalam mencari solusi dalam menanggulangi problematika bangsa yang strategis seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan atau juga dilibatkan dalam menuntaskan agenda global seperti Tujuan Pembangunan Milenium (*Milenium Development Goals/MDGs*). Konsekuensi lain dari sikap eksklusivisme ini juga adalah IPI selalu mengalami kesulitan dalam mencari pendanaan untuk menuntaskan agenda-agendanya, karena memang tidak tampak portofolio IPI dalam jejak sejarah memperbaiki negeri ini. Walaupun demikian harus diakui bahwa IPI adalah salah satu organisasi profesi (pustakawan) terbesar di Indonesia. Untuk itu, upaya rekonstruksi citra dan revitalisasi peran IPI untuk menjadi sebuah organisasi profesi yang layak diperhitungkan di negeri ini harus dilakukan.

### Performansi organisasi

Begitulah kira-kira jejak langkah IPI yang terekam dalam memori kolektif masyarakat Indonesia. Pengalaman lebih dari empat setengah windu tersebut telah memberi begitu banyak pelajaran berharga buat IPI. Salah satunya adalah citra yang melekat dalam pemahaman publik tentang organisasi profesi pustakawan yang bernama IPI.

IPI telah mengokohkan jatidiri sebagai salah satu organisasi profesi di negeri ini. Tapi dari banyak perbincangan dengan berbagai kalangan mendapatkan sebuah kenyataan bahwa selama ini performansi IPI lebih kuat sebagai organisasi tempat berkumpulnya para nostalgialis yang memiliki agenda rutin berupa kongres, seminar atau munas, dan *halal bi halal*. Banyak dari para pustakawan sendiri yang menyimpan sebuah keraguan tentang performansi IPI sebagai organisasi yang dapat memajukan, memperjuangkan, dan mengadvokasi hak para pustakawan. Tampaknya pernyataan keraguan tersebut merupakan sebuah otokritik yang harus diterima dengan lapang dada untuk menuju sebuah kesempurnaan.

Sebenarnya pada awal berdirinya, ketika masih bernama PAPSI (Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia) tahun 1954, organisasi cikal bakal IPI ini sudah memiliki

---

<sup>1</sup> Pemenang Hiburan Keempat Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pustakawan tahun 2009

<sup>2</sup> Pustakawan Pertama pada UPT Balai Informasi Teknologi LIPI

performa yang sangat baik di mata publik dan pemerintah. Dengan capaian yang luar biasa dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang menyebar di seluruh pelosok tanah air, Organisasi ini sempat mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat. Selain itu juga agenda-agenda PAPSI sangat didukung oleh para pemangku kepentingan terutama Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (Departemen Pendidikan). Performa institusi perpustakaan juga secara otomatis meningkat sangat luar biasa dengan ikut sertanya dalam program nasional keaksaraan fungsional (pemberantasan buta huruf) yang sedang menjadi garapan utama pemerintah pada waktu itu.

Masa-masa keemasan yang penuh prestasi itu kini tinggal kenangan manis yang hanya tersimpan dalam laci sejarah. Hari ini kita tidak pernah mendengar lagi kegiatan-kegiatan IPI menjadi buah bibir masyarakat dan juga sepi dari dukungan para pemangku kepentingan seperti Departemen Pendidikan yang dulu begitu bersemangat. Kini IPI seperti seorang pertapa yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan berbangsa dan bernegara, yang hanya turun gunung apabila ada kongres, seminar, dan acara-acara lain yang sifatnya hanya seremonial .

Walaupun demikian, harapan itu masih ada. Dengan berketetapan hati IPI harus percaya diri bahwa dengan semangat dan kemampuan pembelajaran yang dimiliki mampu untuk memperbaiki diri serta siap untuk melakukan sebuah rekonstruksi citra yang telah mengalami degradasi cukup lama. Dan tiada cara lain untuk itu selain membangun performansi kembali. Dan membangun performansi berarti meningkatkan produktivitas atau menambah portofolio IPI sebagai sebuah organisasi profesi. Produktivitas suatu organisasi dapat dicapai apabila memiliki kapasitas tertentu yang dibutuhkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa performansi sangat ditentukan oleh kapasitas total yang dimiliki organisasi.

Sekali lagi bahwa untuk memperbaiki performansi maka harus meningkatkan kapasitas. Kalau memiliki kapasitas yang tinggi, maka dengan sendirinya performansi juga akan meningkat. Sehingga, apa yang diperlukan IPI kemudian adalah sebuah keterampilan teknis untuk membahaskan performansi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa IPI layak dijadikan alternatif solusi bagi problematika bangsa. Bahwa sudah saatnya bangsa ini juga menengok kepada IPI dan memberikan kesempatan untuk mengekspos diri secara tuntas dalam ikut serta memberikan solusi bagi bangsa. Jadi, apa yang harus IPI lakukan adalah meningkatkan kapasitas internal organisasi agar dapat memperbaiki performansi sebagai sebuah organisasi profesi yang memang layak diperhitungkan di negeri ini.

### **Mengembangkan Kapasitas**

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa kapasitas merupakan total dari kemampuan dan daya dukung yang secara riil harus dimiliki IPI. Untuk dapat merealisasikan kehendak-kehendak atau ideal-idealnya. Harus selalu diingat, dalam dunia praktis orang-orang tidak akan menilai kita berdasarkan apa yang kita inginkan atau visi dan misi kita. Mereka menilai kita berdasarkan apa yang dapat kita lakukan atau berdasarkan kemampuan bertindak kita. Mereka akan menanyakan seberapa mampu IPI merealisasikan apa yang diinginkannya. Itulah logika publik, dan itu pulalah elemen utama yang membentuk kepercayaan orang kepada IPI.

Ada sebuah otokritik dari sesepuh kita yaitu Bapak Hernandono pada saat pengukuhan sebagai Pustakawan Utama pada tahun 2005. Menurut pengalaman beliau selama 40 tahun mengamati profil pustakawan Indonesia ada beberapa karakteristik yang menonjol, di antaranya adalah: *pertama*, pustakawan Indonesia pada umumnya seperti mengidap gejala “sindrom autisme”

alias memiliki kecenderungan seolah-olah sibuk dengan dunianya sendiri dan tidak suka bila ada orang lain mengganggu. Sosialisasi dan hubungan pustakawan Indonesia dengan komunitas profesi lain sangat terbatas, tertutup, serta lambat dalam merespon pandangan atau gagasan orang lain yang dirasakan akan mengganggu “zona aman”nya. *Kedua*, masih lemah di dalam penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi. *Ketiga*, tidak banyak menulis. *Keempat*, masih memelihara sifat egoisme, artinya sibuk bekerja sendiri-sendiri yang pada gilirannya membentuk pola pikir terkotak-kotak antar unit kerja dan bahkan antar institusi. Padahal dengan komunitas yang sedikit ini mestinya IPI pandai berkolaborasi dengan profesi lain untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Beliu mengibaratkan keadaan ini, dengan meminjam istilah dari Gede Prama, seperti “burung dengan sebelah sayap” yang tidak bisa terbang kalau tanpa sayap yang lain atau bekerjasama dengan yang lain. (*Kumpulan Naskah Orasi Ilmiah*, hal. 148-152)

Sekali lagi, otokritik tersebut harus diterima dengan lapang dada untuk menuju kesempurnaan. Sekarang pertanyaannya adalah mesti dari mana kita mulai dan kapasitas apa saja yang diperlukan?

Pertama, tentu saja yang paling utama dan pertama yang harus meningkatkan kapasitas elit organisasi atau para pengurus inti organisasi karena ditangan merekalah keberadaan IPI dipertaruhkan. Dalam konteks kita saat ini, ada setidaknya-tidaknya dua bidang garapan yang harus dilakukan oleh para elit organisasi IPI ini. Pertama, strategi pengembangan, yaitu merumuskan strategi untuk mengembangkan organisasi, termasuk di dalamnya merumuskan kader kepemimpinan, keanggotaan, tahapan ekspansi, tema dan agenda kegiatan organisasi pada setiap tahapannya. Kedua, merumuskan berbagai kebijakan yang sebagian dijadikan landasan bagi penyusunan berbagai peraturan atau perundangan untuk diusulkan sebagai kebijakan pemerintah. Oleh karenanya para elit organisasi ini harus mempunyai basis yang kuat pada dua lingkaran pengetahuan. Pertama, basis ilmu keperpustakaan,. Kedua, basis ilmu-ilmu sosial humaniora.

Dalam hal ini kita perlu menengok kembali kiprah Amir Hamzah Nasution yang dijuluki “Sang Penggagas” dalam memajukan dunia perpustakaan di Indonesia. Beliau ini patut diperkenalkan terutama kepada para generasi muda. Gagasannya mengenai pendidikan masyarakat melalui buku dan perpustakaan dengan cara mendekatkan buku dan perpustakaan kepada masyarakat perlu digali dan dikembangkan kembali pada saat ini, misalnya melalui seminar atau workshop. Juga, kiprah beliau di manca negara dalam rangka mengentaskan buta aksara (*functional illiteracy*) terutama di negara-negara Afrika sehingga mampu meningkatkan daya berpikir rakyatnya yang pada gilirannya mampu melahirkan gerakan-gerakan perlawanan terhadap penindasan dan kezaliman perlu direvitalisasi untuk dijadikan teladan bagi para pustakawan dan aktivis sosial kemasyarakatan. Perkataan beliau yang masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia pada saat ini adalah: “*National building* itu bergantung juga kepada kemampuan membaca rakyat dan adanya perpustakaan. Untuk itu harus ada tindakan-tindakan. Hal ini menjadi lebih mendesak, karena sekarang jumlah rakyat yang buta huruf dan putus sekolah terus bertambah, kekurangan guru meningkat dan gedung sekolah banyak yang ambruk. Padahal bangsa kita kaya raya” (Harahap, 1998: hal. 59).

Mengembangkan kapasitas merupakan sebuah keniscayaan bagi para pustakawan, terutama elit organisasi IPI, mengingat perubahan lingkungan strategis yang dihadapi semakin akseleratif. Hal serupa telah diingatkan oleh tokoh legendaris dalam dunia perpustakaan Indonesia yaitu A.G.W. Dunningham, konsultan perpustakaan Indonesia dari UNESCO pada tahun 1954. Beliau mengatakan “Teranglah kiranya, bahwa seorang pegawai perpustakaan yang statis dan tidak

bersemangat, tidak akan dapat melayani kebutuhan-kebutuhan sesuatu masyarakat yang terdiri dari segala warna lapisan dan golongan” (Harahap, 1998: hal. 21).

### **Budaya Organisasi**

Apabila kita ingin menunjukkan bahwa IPI merupakan organisasi profesi yang patut diperhitungkan dalam turut serta menuntaskan problematika bangsa, maka IPI harus mengubah budaya organisasi menuju budaya organisasi yang baru, yaitu budaya organisasi pustakawan profesional. Tentu saja budaya baru ini mengharuskan IPI melakukan beberapa hal.

*Pertama*, memperluas wawasan makro tentang berbagai persoalan kenegaraan atau isu-isu strategis nasional dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Itu dapat dilakukan dengan memperluas pengetahuan teoritis maupun dengan informasi yang luas dalam bidang-bidang tersebut, baik melalui sumber sekunder seperti media massa, maupun sumber primer yaitu menimba pengalaman dari para pelaku langsung melalui dialog, seminar, dll. Hal ini juga mengharuskan IPI mempunyai jaringan komunikasi dan informasi yang luas, serta mengharuskan para pengurusnya membaca lebih banyak, dan bergaul lebih luas supaya tidak seperti “burung dengan sebelah sayap”.

*Kedua*, meningkatkan keterlibatan keikutsertaan IPI dalam dunia pendidikan, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Keterlibatan itu dapat dilakukan di tingkat wacana, bantuan dan dukungan kepada pemerintah untuk pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan publik, maupun terlibat sebagai pelaku langsung.

*Ketiga*, meningkatkan kemampuan IPI dalam membangun jejaring. Janganlah pernah membayangkan bahwa IPI akan mampu mengelola sebuah permasalahan sendiri tanpa bantuan orang lain. Harus diingat bahwa IPI hanyalah salah satu bagian dari sebuah sistem yang besar. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh IPI adalah mengembangkan kemampuannya dalam rangka memperluas jaringan kerja ke berbagai pemangku kepentingan, seperti dengan kalangan politisi, pengusaha, media massa, dan membangun akses kepada para pengambil keputusan dan penentu kebijakan.

*Keempat*, memperbanyak frekuensi kemunculan IPI di hadapan publik dalam berbagai kegiatan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan eksistensi IPI kepada publik. Untuk itu para pustakawan dan pengurus pada khususnya jangan terpacu atau terlalu kaku dalam memahami Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 serta juklak dan juknis yang terkandung dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M/PAN/ 12/2002 karena akan mengkerdulkan peran seorang pustakawan serta akan mendorong pada eksklusivisme organisasi.

### **Strategi Pencitraan**

Sebagaimana telah penulis singgung di atas bahwa IPI perlu melakukan upaya rekonstruksi atau pengelolaan citra. Hal ini sangat urgen dilakukan sekali lagi untuk mendapatkan pengakuan dari publik tentang kiprah dan eksistensi IPI. Konsep pencitraan pertama kali mengajak kita untuk menjawab seluruh pertanyaan yang sangat fundamental: kita ingin dipahami oleh masyarakat seperti apa? Atau citra apa yang kita inginkan bagi diri kita sendiri? Pertanyaan itu menjadi fundamental karena pada dasarnya kitalah yang bertanggungjawab atas citra diri kita. Kitalah yang bertanggungjawab atas kesalahpahaman orang lain terhadap kita. Dengan kata lain, apa yang dipahami orang lain tentang kita sebenarnya dibentuk oleh akumulasi sikap, perilaku, dan cara kita

mengekspresikan diri. Kemunculan kita ke publik secara perlahan-lahan akan membentuk kesan atau imej tertentu dalam benak publik. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar tentang kita, itulah yang menjadi faktor pembentuk citra kita di benak mereka. Citra adalah kesan imajinatif yang terbentuk dalam benak publik dalam rentang waktu tertentu dan terbentuk oleh keseluruhan informasi tentang diri kita yang sampai ke publik (Matta, 2002: 177).

Dengan demikian bisa jadi citra IPI yang terbentuk selama ini tidak secara sadar hasil dari perencanaan yang tidak direncanakan dengan matang. Sekaranglah waktunya IPI untuk melakukan usaha-usaha yang sistematis untuk membentuk citra diri yang diinginkan. Jangan sampai kemunculan IPI ke publik dalam bentuk statemen atau aksi mengalir begitu saja. Relatif tanpa sentuhan seni komunikasi publik yang profesional. Padahal, seni komunikasi publik saat ini mendefinisikan diri sebagai kemampuan mengubah yang biasa menjadi yang luar biasa. Di samping itu IPI harus pandai “mencuri adegan” untuk senantiasa tampil dalam agenda-agenda nasional yang banyak mendapat perhatian publik.

### Epilog

Setiap saat, dalam kehidupan berorganisasi, siapapun bisa saja melakukan kekeliruan dan kesalahan secara kolektif sekalipun. Kekeliruan dan kesalahan itu bisa terjadi sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Dari kesalahan teknis hingga kesalahan strategis. Dari kesalahan analisis lingkungan strategis hingga kesalahan dalam mengambil keputusan. Dalam konteks itulah, IPI perlu menghidupkan budaya perbaikan berkeimbangan sebagai bagian dari keseluruhan kultur organisasi. Sebagai sebuah organisasi, kualitas kolektiflah yang akan memberi peluang untuk bertahan dan terus berkembang. Kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi baru dan perkembangan-perkembangan baru merupakan keniscayaan untuk terus memper-tahankan eksistensi. Komunitas dinosaurus telah punah karena gagal beradaptasi dengan lingkungannya.

Memang, perjalanan menuju kesempurnaan adalah jalan panjang yang sangat berliku dan melelahkan. Hanya dengan budaya perbaikan berkesinambungan yang dapat menjamin bahwa IPI bisa sampai ke titik kesempurnaan terakhir yang diinginkan.

### Daftar Pustaka

- Harahap, Basyral Hamidy dan Tairas, J.N.B. *Kiprah Pustakawan: Seperempat abad Ikatan Pustakawan Indonesia 1973-1998*. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia, 1998.
- Hernandono. “Meretas kebuntuan kepustakawanan Indonesia dilihat dari sisi sumber daya tenaga perpustakaan” dalam *Kumpulan Naskah Orasi Ilmiah Pustakawan Utama 1995-2007*. Editor: Blasius Sudarsono dan Titiek Kismiyati. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2008, hal. 141-167
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN /12/ 2002 dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasiona RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 23 tahun 2003, nomor: 21 tahun 2003.
- Matta, Anis. *Menikmati Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Saksi, 2002.